

PEMBERITAAN MEDIA

EDISI
31 Agustus –
6 September 2020

LULUK'S UPDATE

*MENGUPAS DINAMIKA ISU LINGKUNGAN MINGGUAN
BERSAMA LULUK ULİYAH, SENIOR COMMUNICATION MADANI*

RUU MASYARAKAT ADAT

Panja DPR Sepakat RUU Masyarakat Adat jadi usul inisiatif DPR

- Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya mengatakan sebanyak 8 dari 9 fraksi di DPR RI menyatakan sepakat RUU Masyarakat Adat menjadi usul inisiatif DPR.
- Kesepakatan itu diambil dalam rapat Pleno Panja RUU tentang Masyarakat Adat yang dilaksanakan di kompleks DPR RI di Jakarta, Jumat.
- Dari 9 fraksi yang ada di DPR RI, hanya Fraksi Partai Golkar yang belum bersikap atas RUU Masyarakat Adat tersebut.

- Sebelum disahkan pada rapat pleno di Badan Legislasi, Panja RUU Masyarakat Adat telah melakukan seluruh prosedur pembahasan.
- Prosedur tersebut mulai dari harmonisasi, pembulatan, sampai pemantapan konsepsi yang dilakukan secara intensif dan mendalam dalam rapat-rapat secara fisik maupun virtual mulai 16 April, 22 April, dan 6 Juli 2020.
- Ada 14 hal pokok yang mengemuka dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU ini seperti pengaturan norma, penambahan substansi dan penambahan bab baru
- RUU tersebut akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi RUU inisiatif DPR.
- Setelah itu DPR akan mengirimkan surat kepada pemerintah agar Surat Presiden (Surpres) terkait RUU Masyarakat Hukum Adat segera diserahkan ke DPR.
- RUU Masyarakat Hukum Adat terdiri dari 17 BAB dan 58 pasal dan telah masuk RUU Prolegnas prioritas 2020 serta diusulkan Fraksi Partai NasDem.

KARHUTLA

BMKG Prediksi Terjadi Hujan Lebat Pada Puncak Kemarau di Sumsel

Karhuta Sumatera Selatan

- BMKG Palembang memprediksi, puncak kemarau tahun ini di Sumsel akan diguyur hujan dengan intensitas rendah hingga lebat.
- BMKG menyebut, musim kemarau tahun 2020 akan lebih basah dibandingkan dengan musim kemarau tahun 2019. Maka itu, meski saat ini sedang masuk musim kemarau masih ada hujan yang turun.
- Sesuai dengan prakiraan sifat hujan pada musim kemarau tahun ini yang berada di atas normal sampai dengan bulan Agustus 2020.
- Diperkirakan, sampai berakhirnya musim kemarau tahun ini akan tetap ada hujan dengan intensitas rendah hingga lebat.

Karhuta Sumatera Selatan

- Pada puncak musim kemarau pada bulan Agustus - September 2020 suhu udara di Palembang berkisar 33 derajat celcius sampai 35 derajat celcius.
- Diantara 342 daerah Zona Musim (Zom) di Indonesia, sudah sekitar 69 persen wilayah yang berada di musim kemarau.
- Sementara, sebanyak 65 persen Zom akan mengalami puncak musim kemarau pada bulan Agustus ini terutama wilayah Indonesia bagian selatan equator.
- Saat ini Sumsel memang sedang dalam puncak kemarau, suhu terpanas mencapai 35 derajat celciu

Karhutla di Ogan Komering Ilir Merluas Hingga 91 Ha

Karhuta di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan

- Kebakaran lahan gambut di Kabupaten Ogan Ilir terus meluas
- Pihak BPBD Ogan Ilir mencatat sudah 91 hektar lahan yang sudah terbakar dengan titik api mencapai 38 titik
- Kawasan terparah dialami 2 wilayah yaitu Kecamatan Indralaya Utara dan Kecamatan Pemulutan dimana dalam 2 hari api menghanguskan 20 hektar lahan di kedua kecamatan.
- BPBD Ogan Ilir mengalami kesulitan memadamkan api karena lokasi yang sulit dijangkau dan terbatasnya sumber air, kondisi di perparah dengan lahan gambut yang sudah terbakar.

**Karhuta di Ogan
Komerimg Ilir,
Sumatera Selatan**

- Pemadaman dari udara atau water bombing menjadi alternatif upaya pemadaman api guna mencegah api menjalar ke permukiman warga.
- Sementara Polda Sumatera Selatan dan Polres jajaran menangkap 22 pelaku pembakar lahan di Sumatera Selatan selama bulan Juli dan Agustus 2020
- Dari puluhan pelaku yang diamankan salah satunya pelaku membakar lahan dideket Kawasan Tol Palembang - Indralaya yang sempat mengemuka di media sosial.

1.400 Hektare Lahan di PPU Rawan Terbakar

**Karhuta di
Penajam Paser
Utara
Kalimantan Timur**

- Nurlaila, Kabid Kedaruratan dan BPBD Kabupaten PPU, Kalimantan Timur mengatakan bahwa pemetaan terhadap wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mulai dilakukan. Setidaknya ada 1.400 hektare yang rawan terbakar ketika musim kemarau.
- Untuk mengantisipasi terjadinya karhutla, pihaknya menentukan daerah yang bakal jadi atensi begitu musim kemarau.
- Yang sangat rawan terbakar di PPU adalah lahan gambut. Lokasinya di Desa Girimukti dan Kelurahan Petung
- Kedua lokasi tersebut kerap terbakar pada tiga tahun terakhir saat musim kering.

**Karhuta di
Penajam Paser
Utara
Kalimantan Timur**

- penyebab kebakaran, kebanyakan karena pemilik lahan ingin membuka kebun. Seperti menanam kelapa sawit, serta memanfaatkan lahannya untuk kepentingan bercocok tanam lainnya. Selain itu juga dari puntung rokok. Karena lahan gambut mayoritas dijadikan tempat memancing oleh sebagian masyarakat
- Berdasarkan data, karhutla pada 2019 lalu terjadi 75 titik kebakaran dengan total luas 356,3 hektare dari empat kecamatan se-PPU.
- Sementara tahun ini hingga akhir Agustus, sudah ada 11 kejadian karhutla.
- Total luasan terbakar 24,54 hektare.

121 Orang Menjadi Tersangka Kebakaran Hutan dan Lahan

- Polisi menetapkan 121 orang sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di seluruh Indonesia. Data tersebut dihimpun oleh Direktorat Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal Polri sampai dengan 29 Agustus 2020.

**Kepala Biro
Penerangan
Masyarakat Divisi
Humas Mabes
Polri
Brigadir Jenderal
Awi Setiyono**

- Tersangka perorangan ada 119 orang, sedangkan tersangka dari korporasi ada 2 orang. Adapaun 54 perkara masih proses sidik, 57 perkara sudah tahap II, dan 2 perkara sudah P21

**Kepala Biro
Penerangan
Masyarakat Divisi
Humas Mabes
Polri
Brigadir Jenderal
Awi Setiyono**

- 55 kasus di Kepolisian Daerah Riau dengan 61 tersangka yang membakar area seluas lebih dari 346 hektare; 17 kasus di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dengan 19 tersangka yang membakar area seluas 48,502 hektare; 12 kasus di Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah dengan 12 tersangka karhutla yang membakar area seluas 206,405 hektare.
- Kemudian, 11 kasus di Kepolisian Daerah Jambi dengan 13 tersangka yang membakar area seluas 14,1 hektare; 4 kasus di Kepolisian Daerah Kalimantan Utara dengan 4 tersangka yang membakar area seluas 18 hektare; 3 kasus di Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dengan 3 tersangka yang membakar area seluas 7 hektare.

**Kepala Biro
Penerangan
Masyarakat Divisi
Humas Mabes
Polri
Brigadir Jenderal
Awi Setiyono**

- 2 kasus di Kepolisian Daerah Bangka Belitung dengan 2 tersangka yang membakar area seluas 5,5 hektare; 1 kasus di Kepolisian Daerah Aceh dengan 1 tersangka yang membakar area seluas 28 hektare; 1 kasus di Kepolisian Daerah Kalimantan Timur dengan 1 tersangka yang membakar area seluas 11 hektare; dan 1 kasus di Kepolisian Daerah Jawa Timur yang masih dalam proses penyelidikan.

Jumlah Kasus	Kepolisian	Tersangka	Luas Area Terbakar (ha)
55	Kepolisian Daerah Riau	61 tersangka	346
17	Kepolisian Daerah Sumatera Selatan	19 tersangka	48,502
12	Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah	12 tersangka	206,405
11	Kepolisian Daerah Jambi	13 tersangka	14,1
4	Kepolisian Daerah Kalimantan Utara	4 tersangka	18
3	Kepolisian Daerah Kalimantan Barat	3 tersangka	7
2	Kepolisian Daerah Bangka Belitung	2 tersangka	5,5
1	Kepolisian Daerah Aceh	1 tersangka	28
1	Kepolisian Daerah Kalimantan Timur	1 tersangka	11
1	Kepolisian Daerah Jawa Timur	masih dalam proses penyelidikan.	

Korporasi dan Bank Negara Dorong Karhutla di Indonesia

- Sektor perbankan berperan besar dalam memicu kebakaran hutan lahan (karhutla) dan bencana asap di Indonesia
- Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI) dan bank raksasa Jepang Mizuho Financial Group serta Mitsubishi UFJ Financial Group telah mendanai industri yang “berisiko terhadap hutan” sejak penandatanganan Perjanjian Iklim Paris.
- Menurut data [foresandfinance.org](https://www.foresandfinance.org) bank-bank tersebut mendukung perusahaan yang gagal mengakhiri krisis karhutla di perkebunan kelapa sawit dan pulp di Indonesia.
- Ini tampak dalam pembiayaan Sinar Mas Grup (SMG) yang menjadi penerima manfaat terbesar dari pembiayaan bank di mana SMG menerima pinjaman senilai US\$ 19 milyar dalam lima tahun terakhir (2015-2020), dengan rincian US\$ 14.3 milyar untuk operasi pulp dan kertas, dan US\$ 4,5 milyar untuk operasi perkebunan kelapa sawit nya.

Edi Sutrisno
Direktur Eksekutif
TuK (Transformasi
untuk Keadilan)
INDONESIA

- BRI dan BNI yang tidak memiliki kebijakan publik untuk melarang pembukaan lahan gambut atau penggunaan api oleh klien mereka menjadi pemodal SMG
- bank besar Jepang seperti Mizuho Financial Group dan Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) juga menjadi pemodal yang signifikan selama beberapa tahun terakhir, meskipun mereka telah mengadopsi kebijakan lingkungan dan sosial untuk pembiayaan sejak 2018

Made Ali
Koordinator
Jikalahari

- Alih-alih memulihkan lahan gambut yang berisiko kebakaran, anak perusahaan dan mitra pemasok APP terus menebangi dan mengeringkan area baru lahan gambut, dengan total luas 3.500 hektar sejak 2018, termasuk kawasan dalam zona perlindungan dan restorasi prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia
- Investigasi Jikalahari melaporkan tindak pidana PT. Arara Abadi (AA) anak perusahaan APP yang melakukan pembukaan lahan disertai dengan pembakaran yang disengaja pada Juli 2020 kepada kepolisian.

Made Ali
Koordinator
Jikalahari

- Jikalahari menemukan lahan gambut yang masih membara disiapkan untuk penanaman melalui rekaman pesawat tanpa awak yang diambil pada 3 Juli 2020, seminggu setelah kebakaran terjadi di dalam area konsesi, padahal citra satelit memastikan bahwa daerah tersebut masih berupa hutan pada bulan Januari 2020, data titik api menunjukkan kebakaran terjadi pada 28 Juni 2020.
- Pembakaran yang disengaja di areal PT. AA tidak hanya melanggar peraturan di Indonesia tetapi juga melanggar komitmen dan kebijakan publik APP.
- PT. AA berulang kali melanggar dengan membiarkan kebakaran di konsesinya terjadi setiap tahun sejak 2015, diperkirakan total areal yang terbakar lebih dari 12.000 ha

Rudiansyah
Direktur Eksekutif
WALHI Jambi

- Selain kebakaran, anak perusahaan dan mitra pemasok APP memiliki rekam jejak panjang terkait konflik dengan masyarakat dan pelanggaran hak atas tanah, dengan lebih dari 100 konflik aktif dengan masyarakat.
- PT AA, perusahaan yang diduga sengaja membakar perkebunannya, memiliki sejarah pelanggaran hak masyarakat adat dan melakukan kriminalisasi terhadap anggota masyarakat yang terlibat dalam konflik.

Rudiansyah
Direktur Eksekutif
WALHI Jambi

- Keterbukaan dalam pendanaan merupakan salah satu hal penting untuk diketahui publik agar publik yang menyimpan uang di Lembaga Jasa Keuangan (LJK) mengetahui kemana uang mereka diinvestasikan dan dipinjamkan.
- Apakah uang mereka diinvestasikan ke pelaku bisnis yang menerapkan prinsip berkelanjutan atau malah sebaliknya, diinvestasikan kepada pelaku-pelaku yang melakukan pengrusakan hutan dan melakukan penyerobotan lahan warga sehingga mengakibatkan konflik

Komitmen Perusahaan terhadap Pencegahan Kebakaran Masih Rendah

Edi Sutrisno
Direktur Eksekutif
TuK (Transformasi
untuk Keadilan)
INDONESIA

- Dari data yang dihimpun sejak Januari hingga 14 Agustus 2020, terdapat 5.825 titik api yang berada di dalam konsesi hutan tanaman industri (HTI) dan perkebunan sawit. Jambi menjadi wilayah dengan jumlah titik api terbesar yang terdeteksi di dalam konsesi izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu-hutan tanaman industri (IUPHHK-HTI), disusul Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Riau.

Edi Sutrisno
Direktur Eksekutif
TuK (Transformasi
untuk Keadilan)
INDONESIA

- Pada bulan Juli dan Agustus terjadi peningkatan titik api yang sangat luar biasa. Pada bulan Agustus, selama dua minggu saja di dalam wilayah konsesi terdapat 1.629 titik api. Ini sedikit mengkhawatirkan karena bisa terus meningkat pada bulan September
- Dari hasil kajian Tuk Indonesia, perusahaan yang bertanggung jawab terhadap karhutla juga didukung oleh pembiayaan dari bank Tanah Air.
- Hal ini terungkap dari identifikasi dan analisis berdasarkan laporan keuangan setiap perusahaan. Bank tersebut memberikan pembiayaan hingga ratusan juta dollar AS.

Made Ali
Koordinator
Jikalahari

- dari investigasi yang dilakukan Jikalahari, titik api terbanyak, yaitu 1.388 titik, berada di areal korporasi HTI. Ini disusul 336 titik di kawasan konservasi dan 119 titik di area hak penebangan hutan (dulu hak pengusahaan hutan/HPH kini IUPHHK-Hutan Alam).
- Dari temuan lapangan kemudian disimpulkan bahwa karhutla merupakan kejahatan terorganisasi oleh korporasi untuk tujuan ekonomi tertentu.
- Terkait dengan temuan ini, pihak penegak hukum telah menindak korporasi yang diduga bertanggung jawab terhadap karhutla. Kepolisian Daerah Riau menangani 71 kasus karhutla, sementara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyegel 11 konsesi perusahaan di Riau.

Made Ali
Koordinator
Jikalahari

- Jikalahari terus memantau perkembangan kasus penegakan hukum 11 perusahaan tersebut. Pada 2019 telah dilakukan penegakan hukum terhadap pelaku perorangan dan baru mulai naik sidang pada 2020 untuk empat tersangka.
- Dari 11 perusahaan yang disegel, KLHK kemudian melakukan gugatan perdata pada dua perusahaan, sedangkan sembilan perusahaan lainnya dijatuhi sanksi administrasi. Namun, perwakilan Kementerian ATR/BPN di Riau sampai saat ini tidak melakukan penegakan hukum dan ulasan izin korporasi.
- Putusan perkara karhutla sebenarnya dapat digunakan perbankan untuk me-review kredit yang diberikan kepada korporasi karena syarat sahnya perjanjian telah dilanggar, salah satunya klausa yang halal. Selain putusan pengadilan, temuan lapangan masyarakat juga dapat dijadikan bukti untuk me-review pembiayaan kepada korporasi

Rudiansyah
Direktur Eksekutif
WALHI Jambi

- karhutla yang terjadi pada 2015 dan 2019 di Jambi terjadi di wilayah yang sudah dibebankan izin, seperti di HTI, HPH, dan perkebunan sawit.
- Karhutla terjadi karena perusahaan tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk pencegahan dan penanganan kebakaran.
- Walhi Jambi melihat lemahnya kontrol monitoring dan evaluasi dalam melakukan audit kepatuhan terhadap pemegang izin. Pemerintah tidak bisa memastikan bahwa perusahaan tersebut siap secara infrastruktur apabila menguasai dan mengelola lahan
- Berulangnya karhutla di Jambi juga terjadi akibat perusahaan tidak melakukan upaya pemulihan atau restorasi gambut di wilayah konsesinya masing-masing.

Rudiansyah
Direktur Eksekutif
WALHI Jambi

- Selain itu, pemerintah dinilai hanya menangani kebakaran hanya pada saat kejadian dan tidak menyelesaikan hingga ke akar masalah.
- perusahaan pemegang konsesi sampai saat ini masih terus menciptakan konflik lahan dengan masyarakat. Walhi Jambi mencatat, perusahaan telah menciptakan potensi konflik dengan 120 desa atau komunitas di mana 30 di antaranya terjadi konflik aktif dan belum terselesaikan.
- Dalam catatan Walhi Jambi, banyak sekali pelanggaran yang dilakukan perusahaan, mulai dari konflik lahan maupun intimidasi menggunakan oknum aparat negara untuk mengamankan konsesi mereka. Mereka juga melakukan upaya kriminalisasi dan yang lebih parah mereka menggunakan kekerasan sampai menghilangkan nyawa petani

**Hariadi
Kartodihardjo
Guru Besar
Kebijakan
Kehutanan dan
Lingkungan IPB
University**

- masalah para perusahaan pemegang konsesi yang bertanggung jawab terhadap karhutla tidak bisa dilihat secara parsial. Namun, perlu juga melihat dari mana perusahaan mendapatkan pendanaan dan bagaimana usaha tersebut dijalankan.
- lembaga yang memiliki otoritas terhadap keuangan jangan hanya melihat skema perusahaan tersebut dalam mengembalikan uang kepada bank atau investor. Sejumlah pihak juga harus melihat dan memastikan uang tersebut digunakan dengan baik tanpa merusak lingkungan dan kondisi sosial budaya masyarakat.
- Rencana, kajian, dan analisis digunakan sebagai identifikasi awal atau janji perusahaan dalam mengelola lingkungan hidup dan dampak sosial dengan baik. Kalau janji tidak terpenuhi, pendanaan hijau dapat menjadi instrumen operasional

PELEPASAN KAWASAN HUTAN

Komisi IV DPR akan bentuk Panja Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan

- Komisi IV DPR akan membentuk Panitia Kerja (Panja) penggunaan dan pelepasan kawasan hutan. Tujuannya untuk mengawasi secara ketat untuk mencegah kerusakan di kawasan hutan. Sehingga nantinya akan dibuat aturan yang tegas bagi pelanggar.
- regulasi dalam perizinan menjadi penting untuk mencegah kerusakan kawasan hutan. Pasalnya potensi yang ada di hutan Indonesia dapat menarik eksplorasi dan eksploitasi kawasan hutan.
- Salah satu regulasi yang tengah dipersiapkan terdapat pada Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja atau yang dikenal dengan istilah omnibus law.

Andi Akmal

Pasluddin

Anggota Komisi IV

DPR RI

**Andi Akmal
Pasluddin
Anggota Komisi IV
DPR RI**

- Salah satu pemberian izin yang ditekankan adalah terkait dengan izin industri pertambangan. Meski pun terdapat peluang ekonomi yang besar dalam industri pertambangan, tetapi diyakini terdapat potensi kerusakan yang besar pula.
- dalam meminimalisir kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan perlu upaya keras. Sehingga izin menjalankan usaha dan beroperasi sesuai dengan standarisasi pengolahan limbah.
- Pembinaan masyarakat di kawasan hutan juga menjadi penting dalam upaya pelestarian hutan. Sehingga masyarakat kawasan hutan dapat menjaga hutan sekaligus memanfaatkan peluang ekonominya.

**Andi Akmal
Pasluddin
Anggota Komisi IV
DPR RI**

- Saat ini pemerintah dan DPR tengah membahas omnibus law. Saat ini pembahasan telah masuk ke BAB III Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha.
- Salah satu bahasan dalam bab tersebut adalah mengenai penerapan perizinan berusaha berbasis risiko.
- Selain itu juga diatur mengenai penyederhanaan perizinan berusaha sektor serta kemudahan dan persyaratan investasi termasuk di kawasan hutan.

Sumber Berita

- <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/04/13535551/politikus-pkb-ruu-hukum-adat-penting-untuk-lindungi-hak-masyarakat?page=all>
- <https://www.validnews.id/DPR-Mulai-Harmonisasi-RUU-Masyarakat-Adat-hYo>
- <https://www.antaraneews.com/berita/1707458/panja-sepakat-ruu-masyarakat-adat-jadi-usul-inisiatif-dpr>
- <https://www.beritasatu.com/willy-masaharu/politik/672897/selangkah-lagi-ruu-masyarakat-adat-jadi-usulan-dpr>
- <https://nasional.tempo.co/read/1383002/121-orang-menjadi-tersangka-kebakaran-hutan-dan-lahan/full&view=ok>
- <https://nasional.tempo.co/read/1383002/121-orang-menjadi-tersangka-kebakaran-hutan-dan-lahan/full&view=ok>
- <https://video.sindonews.com/play/2228/kebakaran-hutan-lahan-gambut-di-ogon-ilir-meluas-hingga-91-hektar>
- <https://news.okezone.com/read/2020/09/03/610/2271880/91-hektare-lahan-di-ogon-ilir-sumsel-hangus-terbakar>
- <https://kaltim.prokal.co/read/news/376204-1400-hektare-lahan-di-ppu-rawan-terbakar.html>
- <https://www.infosawit.com/news/10189/korporasi-dan-bank-negara-dorong-karhutla-di-indonesia>
- <https://palembang.tribunnews.com/2020/09/03/bmkg-prediksi-terjadi-hujan-lebat-pada-puncak-kemarau-di-sumsel-ini-penyebabnya>
- <https://kompas.id/baca/humaniora/2020/09/03/komitmen-perusahaan-masih-rendah/>
- <https://nasional.kontan.co.id/news/komisi-iv-dpr-akan-bentuk-panja-penggunaan-dan-pelepasan-kawasan-hutan-untuk-apa>

LULUK'S UPDATE

**MENGUPAS DINAMIKA ISU LINGKUNGAN MINGGUAN
BERSAMA LULUK ULIAH, SENIOR COMMUNICATION MADANI**

**SETIAP SENIN
9.00 – 9.30 WIB**



@madaniberkelanjutan.id

Madani

